



KATA PENGANTAR

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun (tahun 2022) dengan berpedoman pada RENSTRA 2023-2026 dan RPD Kabupaten Sarolangun 2023-2026.

Penyusunan Rencana kerja OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disadari bahwa Rencana kerja 2024 ini masih jauh dari sempurna maka diharapkan saran dan masukan semua pihak khususnya dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun guna lebih meningkatkan kinerja organisasi sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi tugas kedewanan Anggota DPRD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Oleh karena itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana kerja 2024 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

Sekretaris,

EFPRIANTO,SP.d.,M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680918 199903 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang memuat Program dan Kegiatan, dalam Penyusunan Rencana Kerja ini diarahkan pada penyesuaian program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan RPD. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun Dokumen Perencanaan mulai dari RPJP-D, RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD, kemudian dijabarkan dalam APBD guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi. Hal ini mencerminkan Pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah bagian dari proses Perencanaan yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiologi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :



1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaann Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 38);



17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah merumuskan rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2024 antara lain adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2024
- Memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2024 adalah sebagai pedoman:

- Pelaksanaan Pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
- Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

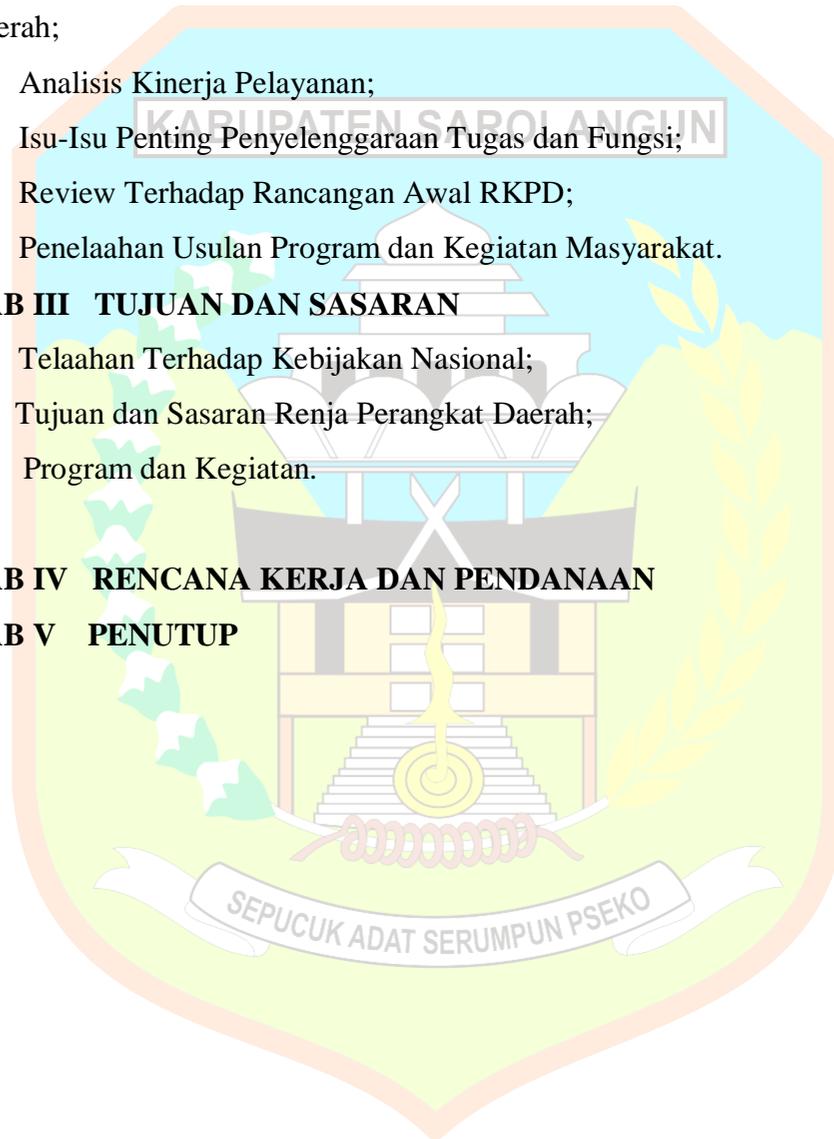
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk Memantapkan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Untuk penyusunan Rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun melaksanakan sebanyak 2 (Dua) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang didalam APBD sejumlah Rp. 55.309.570.936,00 (Lima puluh Lima milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 53.179.733.051,00 (Lima puluh tiga milyar serratus tujuh tiga puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) atau sebesar 96,16 %.



Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.654.577.871	43.748.831.022	96
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	9.654.993.065	9.430.902.029	98

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan diatas, maka sisa anggaran sebesar Rp. 2.129.837.885,00 yang disebabkan oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 96 % dikarenakan sesuai dengan kebutuhan;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar 98 % dikarenakan sesuai dengan kebutuhan;

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tahun anggaran 2024 adalah :

1. Mempersiapkan dokumen perencanaan lebih awal yaitu satu tahun sebelumnya, sehingga kegiatan akan dilaksanakan lebih cepat pada awal tahun anggaran.
2. Melaksanakan pengawasan kegiatan lebih intensif sehingga dapat meminimalisir keterlambatan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama adalah serangkaian indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi atau kurangnya keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis.

Adapun pencapaian indikator kinerja utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2023 Persentase Bimbingan teknis bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD dan Persentase pelaksanaan Pelayanan kinerja yang berbasis IPTEK dalam melakukan tugas dan fungsi DPRD , Tingkat capaian dibandingkan target yang telah ditetapkan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang salah satunya tersedianya tersedianya Bimbingan teknis bagi pimpinan dan Anggota serta bagi PNS Sekretariat DPRD pada tahun 2023 untuk indikator kinerja ini terealisasi



sebesar 90% dengan persentase sebesar 90% dengan capaian kinerja 100% hal ini disebabkan adanya efisiensi pelaksanaan anggaran

Dari Capaian Kinerja diatas dapat dilihat bahwa Target Persentase Bimbingan teknis bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD dan Persentase pelaksanaan Pelayanan kinerja yang berbasis IPTEK dalam melakakan tugas dan fungsi DPRD. Bimbingan teknis bagi pempinan dan anggota serta PNS secretariat di targetkan 20 kali Bimtek, terlaksanakan sebanyak 18 kali rapat, Walaupun dalam pelaksanaan kadang tertunda namun pelaksanaannya tetap dilaksanakan sesuai dengan yang di rencanakan, jadi Kinerja ini tercapai sebesar 100% atau Sangat Baik.

Tabel Kegiatan Bimtek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPDR tahun 2023

No	Uraian Bimtek	Jumlah
1	Bimtek Dewan perwakilan Rakyat Daerah	1 kali
2	Bimtek Partai Golkar	Kali
3	Bimtek Partai PDIP	20 Kali
4	Bimtek Partai PPP	66 Kali
5	Bimtek Partai Gerindra	1 Kali
6	Bimtek Partai Demokrat	2 Kali
7	Bimtek Partai PAN	10 Kali
8	Bimtek Partai Nasdem	
9	Bimtek Sekretariat DPRD	3 Kali
	Jumlah	158 Kali

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretriati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan pelayanan terhadap pelksanaan tugas dan fungsi sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD selaku entinitas penting dalam Pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitas terhadap pelaksanaan tiap-



tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 dari target/sasaran sebesar 90 % rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebesar 96 %.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasikan kelompok Pakar dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 (Januari dan Desember) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

- a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
- b. Dinamika politik yang berkembang di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
- c. Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasikan aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang ditandai dengan kurang disiplin.

2.2.2 Tantangan dan Peluang



Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan.
- b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait instansi pelaksana tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka pewujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Semakin meningkatnya pengawasan/control dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sarolangun.
- b. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan DPRD
- c. Kerjasama dengan Stake Holders dan Instansi terkait cukup baik
- d. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPRD.
- e. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokrasi.
- f. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
- g. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rancangan RPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Rencana Kerja SKPD dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.



Rancangan RPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Secara keseluruhan, hasil review terhadap Rancangan RKPD/ Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini :





Tabel 2.4. Review Terhadap Program Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (2024)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	61005300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	61005300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		28.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		28.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		30.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		56.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		56.500.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		78.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		78.000.000	



	Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		44.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		44.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		4.051.644.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		4.051.644.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		375.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		375.120.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		6.500.000		Kab. Sarolangun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		6.500.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		89.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		89.500.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						



1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	52.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	52.000.000	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	41.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	41.500.000	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	50.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	266.900.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	266.900.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sarolangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	160.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sarolangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	160.000.000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					



1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	80.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	80.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	41.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	41.500.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	120.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	120.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50.000.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	200.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	200.000.000	



8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.600.000.000	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	30.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2.750.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2.750.000.000	
2	Pengadaan Mebel	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1.305.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1.305.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	772.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	772.000.000	
4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	410.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	410.000.000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	299.470.000,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	299.470.000,	



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	566.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	566.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1.120.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1.120.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.452.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.452.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sarolangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	453.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sarolangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	453.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50.000.000	



3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	355.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	355.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1.825.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1.825.760.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1.340.850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sarolangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1.340.850.000	
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	17.415.521.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	17.415.521.000	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	888.500.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	888.500.000	
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	401.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	401.000.000	
10	Layanan Administrasi DPRD					Layanan Administrasi DPRD					
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	9.446.000.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	9.446.000.000	
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	999.500.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	999.500.000	



3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	2.110.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	2.110.000.000		
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	366.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	366.000.000		
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	270.500.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	270.500.000		
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	138.500.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	138.500.000		
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	312.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	312.000.000		
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	134.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	134.000.000		



Pembahasan Kebijakan Anggaran						Pembahasan Kebijakan Anggaran					
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	251.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	251.000.000	
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	231.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	231.000.000	
3	Pembahasan APBD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	286.500.000	Pembahasan APBD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	286.500.000	
4	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	234.500.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	234.500.000	
5	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	35.000.000	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	35.000.000	
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1.060.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1.060.000.000	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Laporan	30.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Laporan	30.500.000	
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	31.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	31.500.000	



3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	32.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	32.500.000	
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	32.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	32.000.000	
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	30.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	30.500.000	
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	30.500.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	30.500.000	
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	32.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	32.000.000	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD					Peningkatan Kapasitas DPRD					
1	Orientasi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1.008.000.000	Orientasi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1.008.000.000	
2	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1.727.500.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1.727.500.000	
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	168.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Sarolangun	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	168.000.000	
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Sarolangun	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	264.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Sarolangun	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	264.000.000	



5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	45.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	45.000.000	
6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	187.500.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	187.500.000	
7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1.181.200.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1.181.200.000	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dokumen	20.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dokumen	20.000.000	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	156.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	156.000.000	
3	Pelaksanaan Reses	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1.426.500.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1.426.500.000	
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Sarolangun	Tersusunnya Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	375.500.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Sarolangun	Tersusunnya Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	375.500.000	
5	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	218.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	218.500.000	
6	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	157.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Sarolangun	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	157.000.000	
6	Pembahasan Kerja Sama Daerah					Pembahasan Kerja Sama Daerah					
1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	47.000.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Sarolangun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	47.000.000	



	JUMLAH	62.497.345.000	JUMLAH	62.497.345.000	
--	--------	----------------	--------	----------------	--





Rincian anggaran program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan Hasil analisis kebutuhan dan Rancangan Awal RKPD terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertambah dari tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2024 merupakan akhir dari periode 2019 s/2024 dan merupakan awal dari periode 2024 s/d 2029.

Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun yang akan dicapai pada tahun 2024 sebanyak 2 (Dua) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKPD Sistematis dan Substansi sudah mengacu pada peraturan tersebut namun belum sempurna. Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah menampung usulan program dan kegiatan dari perangkat daerah dan juga usulan program dan kegiatan secara partisipatif yaitu menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau stakeholder melalui mekanisme musrenbang dan forum perangkat daerah, dari musrenbang dan forum perangkat daerah inilah usulan program dan kegiatan direkapitulasi di renja perangkat daerah, kemudian dari renja perangkat daerah usulan program dan kegiatan di adopsi sehingga tersusun rancangan awal RKPD.



2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun dan Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan dan dukungan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya legislasi, Anggaran dan Pengawas.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Sarolangun

Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Terkait dengan tugas dan fungsi pokok dan fungsi, maka Sekretariat DPRD tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari SKPD yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah, Karna tidak mempunyai hubungan hierarki dan kepentingan secara dan kepenting secara langsung



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja tahunan yang telah tertera pada dokumen RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026.

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJMN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar



6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan public

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin perwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat. DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktifitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD

Seiring dengan rumusan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun 2023 – 2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut:



Tabel tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Persentase pelayanan kinerja DPRD yang berbasis IPTEK dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu DPRD dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan di Kesekretariatan, urusan umum, urusan persidangan dan urusan keuangan dan perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan Organisasi..

Untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis pada tahun 2024 maka dirumuskan program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja Sekretarit DPRD. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024 sebanyak 2 Pogram 18 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp 62.497.345.000,00,-.

Rincian Program dan Kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut ini:



NOMOR		PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3
04.02.01		
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	2.16	Layanan Administrasi DPRD
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah





BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terdapat 2 (Dua) program dan 16 (Enam belas) kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.





Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
				Tahun - 1	Tahun N			Tahun + 1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Sekretariat DPRD										
4										
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 2										
	SEKRETARIAT DPRD									
40 02										
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
40 02.01										
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
40 02.01.0001										
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 350.000.000
40 02.01.0002										
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 170.075.000				Rp. 170.075.000	Rp. 284.000.000



40	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 180.000.000			Rp. 180.000.000	Rp. 450.000.000
40	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000	Rp. 250.000.000
4	2	2	2,02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								
40	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 591.885.100			Rp. 591.885.100	Rp. 250.000.000
40	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 583.188.300			Rp. 583.188.300	Rp. 240.000.000
40	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 649.785.720			Rp. 649.785.720	Rp. 300.000.000
40	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 578.208.400			Rp. 578.208.400	Rp. 270.000.000



40	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 216.648.000			Rp. 216.648.000	Rp. 1.090.000.000
4	2	2	2,04	Peningkatan Kapasitas DPRD							
40	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 438.044.060			Rp. 438.044.060	Rp. 2.500.000.000
40	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.717.500.000			Rp. 1.717.500.000	Rp. 2.500.000.000
40	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 168.000.000			Rp. 168.000.000	Rp. 168.000.000
40	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 264.000.000			Rp. 264.000.000	Rp. 264.000.000
40	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan,	Rp. 51.750.000			Rp. 51.750.000	Rp. 50.000.000



					Semua Kel/Desa					
40 2	022.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 80.401.600			Rp. 80.401.600	Rp. 350.000.000
40 2	022.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 999.438.000			Rp. 999.438.000	Rp. 1.200.000.000
40 2	022.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
40 2	022.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000
40 2	022.05	0003	Pelaksanaan Reses	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.559.777.200			Rp. 1.559.777.200	Rp. 1.500.000.000
4 2 2	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
40 2	022.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 70.000.000			Rp. 70.000.000	Rp. 250.000.000



40	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 256.320.000			Rp. 256.320.000	Rp. 450.000.000
40	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.620.800			Rp. 78.620.800	Rp. 90.000.000
40	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 71.556.600			Rp. 71.556.600	Rp. 85.000.000
40	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
40	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.411.000			Rp. 35.411.000	Rp. 50.000.000
40	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 55.000.000
4	2	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
40	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan,		Rp. 260.000.000			Rp. 260.000.000	Rp. 170.000.000



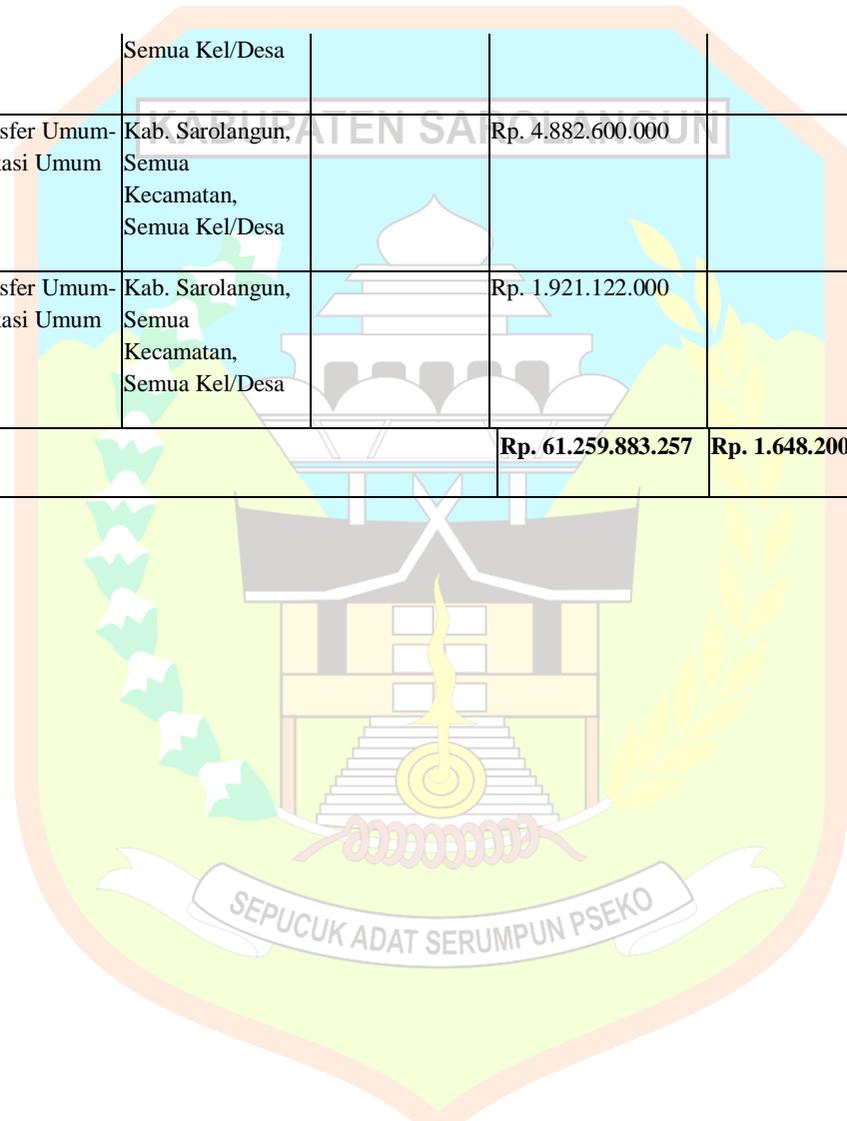
					Semua Kel/Desa						
40	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 700.000.000			Rp. 700.000.000	Rp. 2.700.000.000
40	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 26.400.000			Rp. 26.400.000	Rp. 50.000.000
40	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
40	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 800.000.000			Rp. 800.000.000	Rp. 150.000.000
40	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 300.000.000			Rp. 300.000.000	Rp. 500.000.000
40	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 298.200.000			Rp. 298.200.000	Rp. 750.000.000
40	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 350.000.000



40	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 91.940.000	Rp. 50.000.000			Rp. 141.940.000	Rp. 750.000.000
40	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 186.800.000	Rp. 150.000.000			Rp. 336.800.000	Rp. 750.000.000
4	2	1	2,15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
40	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.357.956.205				Rp. 17.357.956.205	Rp. 18.000.000
40	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 873.500.000				Rp. 873.500.000	Rp. 1.200.000.000
40	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 356.709.300				Rp. 356.709.300	Rp. 460.000.000
4	2	1	2,16	Layanan Administrasi DPRD								
40	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan,	Rp. 18.171.249.800				Rp. 18.171.249.800	Rp. 10.000.000.000



					Semua Kel/Desa							
40	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 4.882.600.000				Rp. 4.882.600.000	Rp. 1.000.000.000
40	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.921.122.000				Rp. 1.921.122.000	Rp. 2.100.000.000
Jumlah							Rp. 61.259.883.257	Rp. 1.648.200.000			Rp. 62.908.083.257	Rp. 41.274.000.000







BAB V PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Renca Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Rancangan Rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renca Kerja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melayani dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Sarolangun.

Semoga Renca Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ini dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran 2024 Terima Kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**
Sekretaris,

EFPRIANTO,SP.d., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680918 199903 1 002